

PELAKSANAAN PENGAWASAN LAHAN DALAM MENCEGAH KEBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN SIAK.

**Sri Wahyuni
Ernawati**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax
(0761) 63277

Sriwahyuni.53119@yahoo.com

Abstract: implementation of land control in preventing fires in Siak regency. Key informants were used in this study is a personnel staff UPTD and forestry and plantation office Siak. This is a descriptive study in which qualitative data collection was done by using snowball sampling. The factors that influence the implementation of land control in preventing fires in Siak among other factors Human Resources, or the cost of funds, and lack of community participation. The third factor has a profound influence on the implementation of land with impact supervision different.

Keywords: Monitoring, forest fire, Siak district.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan Sumber Daya Alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana hutan merupakan suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuhan-tumbuhan lebat yang berisi antara lain Pohon, Semak, Paku-pakuan, Rumput, Jamur dan sebagainya. Tercantum dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dibidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, pariwisata, ladang dan kebun bagi masyarakat.

Keberadaan kawasan hutan dan atau lahan di Kabupaten Siak, sampai dengan akhir tahun 2010 masih mencapai ketentuan minimal luas kawasan sebagaimana amanat Undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu 30% dengan luas daratan. Sampai dengan tahun 2010 luas kawasan hutan di Kabupaten Siak \pm 324.865,03 Ha atau sebesar \pm 37,97% Sementara luas lahan perkebunan yang ada (baik dikelola oleh pemba, swasta, dan kebun rakyat) seluas \pm 245.375,23 Ha atau sebesar \pm 28,68% dimana luas hutan dan lahan perkebunan mencapai 66,65% dari total luas wilayah Kabupaten Siak, untuk itu diperlukan pengelolaan, perlindungan dan pengamanan hutan dan lahan secara intensif, dan perencanaan yang baik kearah sinergitas pengelolaan hutan dan lahan secara optimal.

Kerusakan hutan yang terjadi akhir-akhir ini ternyata sangat merugikan bagi kelangsungan pembangunan masyarakat dan pembangunan wilayah serta kondisi lingkungan ekosistem penunjang kehidupan. Kerusakan hutan dan lahan selama ini adalah akibat gangguan keamanan terhadap pengelolaan hutan dan atau lahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab , yang mengakibatkan kaidah peralihan fungsi kawasan, illegal logging dan kebakaran hutan atau lahan. Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2006 kebakaran hutan atau lahan adalah proses nyala api yang terjadi dikawasan hutan atau lahan serta disebabkan akibat ulah manusia atau bencana alam. Syaufina (2008) menjelaskan bahwa faktor penyebab kebakaran lahan dan hutan di indonesia 99% disebabkan oleh manusia baik sengaja maupun tidak sengaja sedangkan faktor alam hanya memegang peranan yang sangat kecil yaitu 1%.

Selain itu kebakaran lahan yang terjadi juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kepedulian masyarakat untuk membangun kelapa sawit cukup tinggi.
2. Perambahan terhadap lahan yang dianggap tidak jelas kepemilikannya.
3. Kepedulian masyarakat khususnya dan dunia usaha serta aparaturnya di daerah masih rendah terhadap kebakaran lahan.
4. Peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat dilaksanakan secara utuh oleh semua pihak yang terkait.
5. Maklumat dari Gubernur Riau bersama kapolda kajati tentang larangan membakar belum direspon oleh semua perangkat dan pihak terkait di daerah.
6. Sistem perladangan tradisional dari penduduk setempat yang berpindah-pindah.
7. Pembukaan hutan oleh para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk industri kayu maupun perkebunan kelapa sawit.
8. Penyebab struktural, yaitu kombinasi antara kemiskinan, kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik antar hukum adat dan hukum positif negara.
9. karena keterbatasan sarana dan prasarana.
10. Kemampuan sumberdaya manusia, dana, dan letak lokasi yang sulit untuk dapat segera dijangkau. Serta memerlukan waktu yang cukup lama. Padahal, pemadaman kebakaran memerlukan kecepatan dan keberhasilan untuk mengatasi.
11. Belum semua perusahaan perkebunan, melaksanakan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dengan baik.

Hal itu menunjukkan bahwa masalah banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran lahan di akibatkan oleh ulah manusia seperti pembukaan lahan melalui pembakaran lahan secara besar-besaran guna untuk pembangunan, perkebunan, perladangan dan lain-lain.

Tabel 1.1 Berikut data rekapitulasi luas kebakaran lahan di Kabupaten Siak Tahun 2005 s/d 2011

No	Tahun	Kecamatan	Luas Areal Terbakar	Titik Api	Keterangan
1	2005	4 Kecamatan	800 Ha	1.547	Lahan Masyarakat
2	2006	6 Kecamatan	760 Ha	-	
3	2007	5 Kecamatan	1387 Ha	65	
4	2008	6 Kecamatan	1156 Ha	-	
5	2009	6 Kecamatan	1361 Ha	356	
6	2010	4 Kecamatan	97 Ha	10	
7	2011	4 Kecamatan	1141 Ha	126	
Jumlah luas areal terbakar					6702 Ha

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

Kabupaten Siak pada saat ini belum memiliki regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, oleh sebab itu didalam setiap aktifitas pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan tugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, dan bekerja sama dengan Brigade pengendalian kebakaran Hutan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Seksi Siak yang berada di bawah naungan Departemen Kehutanan.

Adapun yang diawasi dalam hal ini yaitu areal atau lokasi-lokasi yang rawan terjadinya titik kebakaran terutama pada lahan gambut, lahan bekas bakar dan areal pertanian masyarakat. Dalam rangka mencegah sebelum terjadinya kebakaran lahan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melibatkan personil dari Dinas Kehutanan dan perkebunan serta di bantu oleh Tim manggala Agni yang berjumlah 13 orang, dan selain itu juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) karena BMKG bisa memantau hotspot dan memberikan informasi bersama-sama memantau titik yang terjadi hospot serta mereka juga menerima informasi dari masyarakat. Jadi dalam hal pengawasan lahan semuanya pihak baik PNS, masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kebakaran lahan.

Berdasarkan peraturan menteri Negara No.10 Tahun 2010 Tentang lingkungan hidup yaitu Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan lahan dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sesuai dengan pengertian dari pengawasan itu sendiri yaitu Siagian (1997:25) merupakan usaha yang dilakukan untuk menjamin kelancaran pekerjaan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna Sarwoto (1990:45) Mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan menejer yang mengusahakan

agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dari pengertian pengawasan ini jelas bahwa pelaksanaan pengawasan adalah bertujuan untuk menjamin kelancaran dalam suatu organisasi sehingga diperoleh kinerja yang baik, hal ini juga dikarenakan pengawasan adalah alat kontrol pelaksanaan tugas bahwa untuk tercapainya suatu tujuan organisasi.

Tabel 1.2 Matrik Patroli Rutin yang di lakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak

No	Lokasi	Jumlah Patroli	Keterangan
1.	Kec. Sungai Mandau	2 Kali	Patroli dilakukan kedaerah yang rawan akan terjadi kebakaran lahan.
2.	Kec. Sabak Auh	1 Kali	
3.	Kec. Koto Gasip	3 Kali	
4.	Kec. Kandis	1 Kali	
5.	Kec. Bunga Raya	2 Kalai	
6.	Kec. Pusako	1 Kalai	
7.	Kec. Sungai Apit	2 Kalai	
8.	Kec. Minas	1 Kalai	
9.	Kec. Mempura & Dayun	2 Kali	

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kebakaran lahan telah menjadi fenomena dari tahun ke tahun. Hal ini juga dapat dilihat dari rentang jumlah kebakaran yang tidak mengalami penurunan secara signifikan, akan tetapi meskipun pada tahun 2010 bencana kebakaran lahan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007 yang mengalami jumlah tingkat kebakaran yang paling tinggi. Kebakaran hutan dan lahan senantiasa terjadi di Kabupaten Siak tujuh tahun terakhir ini kurang lebih \pm 6702 hektar. Kebijakan mengenai pengendalian kebakaran Hutan/Lahan (PKHL) adalah pemberian sanksi dan denda penyebab kebakaran lahan. Tindakan hukum bagi penyebab kebakaran lahan telah diatur dalam PERPU No. 1 tahun 2004 dalam pasal 78 ayat 3,4, dan 11 yaitu:

1. Sengaja membakar hutan dan lahan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah.
2. Kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran lahan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 milyar rupiah.
3. Membuang benda yang dapat menyebabkan kebakaran lahan pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Fakta dari beberapa kejadian kebakaran lahan menunjukkan bahwa pengawasan kebakaran lebih difokuskan pada aspek pemadaman dari pada pencegahan. Hal ini tersirat dari:

- a) Masih terpusat pada aspek pemadaman sedang pencegahan atau pengawasan belum di maksimalkan.

- b) Peran para pihak, manggala agni (MA), satuan pengendalian kebakaran, regu pemadam, dan masyarakat peduli api (MPA) dalam upaya pengawasan atau pencegahan dan pemadaman belum optimal.
- c) Peraturan Menhut No. P.12 Tahun 2009 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan Meneg LH No. 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya mampu memfasilitasi dan meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi untuk menjamin pencegahan kebakaran di tingkat bawah (lapangan) secara lebih baik.

Sumber: Panduan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Upaya-upaya pengawasan dan pencegahan lahan yang telah dilakukan ternyata tidak dapat mencegah lahan secara total terhindar dari bencana terjadinya kebakaran lahan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kebakaran lahan yang dilakukan untuk pembukaan lahan melalui cara pembakaran lahan masih terus terjadi sedangkan upaya pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. Dilihat dari gejala diatas tersebut maka penulis tertarik untuk membuat dan menyusun penelitian dengan judul **“Pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Siak”**.

Masalah dalam hal ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Siak? dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan tersebut? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Siak. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Siak.

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan yang maka pelaksanaan meliputi pengawasan. Jadi, jelas disini bahwa manajemen dan pengawasan memiliki perbedaan. Secara lebih singkat dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki cakupan yang lebih luas daripada pengawasan. Sedangkan pengawasan sendiri merupakan bagian dari proses manajemen. **Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (1997:45)** mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengawasan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua perjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencanayang telah ditentukan sebelumnya. **Menurut Winardi (2000:161)**, terdapat faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan:

- a. Sasaran-sasaran individual dan organisatoris biasanya berbeda, (maka dengan demikian perlu adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisatoris).

- b. Pengawasan diperlukan, disebabkan oleh karena terdapat adanya satu keterlambatan antara waktu dan sasaran dan sewaktu mereka direalisasikan.

Beberapa asas-asas pengawasan menurut **Koontz dan O'donell dalam Hasibuan (2005: 243)**, yaitu:

1. Pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*) yaitu dengan mengandalkan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
2. Pengawasan itu efisien (*principle of efficiency of control*), jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
3. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika pimpinan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana (*principle of responsibility*).
4. Ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan baik yang akan terjadi maupun yang telah terjadi (*principle of future control*), yang baik pada waktu sekarang maupun dimasa yang akan datang.
5. Teknik kontrol yang paling baik (*principle of direct control*) adalah mengusahakan adanya pimpinan bawahan yang berkualitas baik.
6. Pengawasan harus dilaksanakan dengan baik (*principle of reflection plans*), sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
7. Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi (*principle of organization suitability*).
8. Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan pimpinan (*principle of individual of control*).
9. Pengawasan yang efektif dan efisien (*principle of standar*), memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
10. Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam organisasi (*principle of strategic point control*).
11. Efisien dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian (*The exception principle*). Kecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Pengawasan harus luwes (*principle of flexibility of control*) untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
13. Sistem pengawasan harus ditinjau berulang kali (*principle of review*), agar sistem yang digunakan berguna atau mencapai tujuan.
14. Pengawasan dapat dilakukan (*principle of action*), apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan planning, organizing, staffing, dan directing.

Menurut Silalahi (2003:176) menyatakan bahwa dalam pengawasan diperlukan langkah :

1. Menentukan objek yang diawasi.

2. Menentukan standar sebagai alat ukur pengawasan atau menggambarkan pengawasan yang dikehendaki.
3. Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang digunakan .
4. Mengukur hasil kerja yang dilaksanakan.
5. Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apa ada perbedaan.
6. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti.

Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut. **Menurut Manullang (1991:183)** mengatakan ada beberapa proses pengawasan :

1. Menetapkan alat pengukur
 - a. Standar dalam bentuk fisik
 - Kualitas
 - Kuantitas
 - Waktu
 - b. Standar dalam bentuk uang
 - Standar biaya
 - Standar penghasilan
 - Standar investasi
2. Mengadakan penilaian (evaluate)
 - a. Dari laporan tertulis bawahan baik laporan rutin atau laporan istimewa.
 - b. Mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan (correction action)

Tindakan ini dilakukan bila fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang sebelumnya menyimpang, agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka :

Pertama-tama haruslah dianalisa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.

 - Harus diketahui terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu
 - Bila sudah dapat ditetapkan dengan sebab_akibat terjadinya penyimpangan baru diambil tindakan perbaikan.

Menurut Kusnadi (2002:265) semua aktivitas organisasi harus senantiasa diawasi dan aktivitas pengawasan yang baik, efektif dan efisien harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal sehingga semua aspek yang diawasi sudah dipertimbangkan seluruhnya.

Umumnya tujuh pengawasan meliputi:

1. Pengukuran terhadap kebijakan , rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Menjaga sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi.

3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
4. Di percayanya informasi dan keterpaduan informasi yang ada didalam organisasi.
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan kemudian mencari solusi yang tepat.

Dengan demikian tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarah seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena perlu kreteria, norma, standar dan ukuran.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *key informan*. Peneliti menetapkan Kepala bagian sebagai *key informan* atau informan kunci. Dari *key informan* tersebut akan diperoleh informan-informan susulan yaitu terdiri dari Bagian pembinaan dan pengawasan dan beberapa masyarakat yang bisa menilai dari Pelaksanaan Pengawasan Lahan dalam Mencegah Kebakaran Lahan di Kabupaten Siak. Peneliti menggunakan metode *snowball sampling* atau bola salju, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pihak atau orang yang memang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan apabila dalam proses pengumpulan data sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi, maka proses pengumpulan informasi sudah dianggap selesai.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan-informan susulan penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Lahan dalam Mencegah Kebakaran Lahan di Kabupaten Siak. Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti, Dokumentasi, rekapitulasi luas kebakaran lahan di Kabupaten Siak Serta data tentang Profil Kantor dan data-data pendukung lainnya sesuai dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain wawancara (*interview*) yakni mengadakan wawancara langsung terhadap informan mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni Pelaksanaan Pengawasan Lahan dalam Mencegah Kebakaran Lahan di Kabupaten Siak . Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilokasi peneletian mengenai permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan

Pelaksanaan Pengawasan Lahan dalam Mencegah Kebakaran Lahan di Kabupaten Siak. Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu Pelaksanaan Pengawasan Lahan dalam Mencegah Kebakaran Lahan di Kabupaten Siak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini dikaji secara deskriptif, artinya penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada yang didukung dengan dilakukannya wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian data-data tersebut dianalisa sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deskriptif pula.

HASIL

Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestiny atau tidak.

A. Menetapkan alat pengukur (standar)

Standar pada umumnya terdapat pada rencana yang telah dibuat, baik itu rencana keseluruhan maupun rencana-rencana bagian. Dengan kata lain dengan rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan kegiatan. Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan kurang berperan aktif (kurang maksimal) khususnya diareal perkebunan masyarakat sehingga tidak jarang jika terjadi kebakaran masyarakat berusaha untuk memadamkan api itu sendiri dengan peralatan yang seadanya, terjadinya kebakaran di lahan masyarakat setempat sulit untuk mendapatkan bantuan pertolongan kepada tim pemadam kebakaran sedangkan tempatnya cukup jauh dari lahan sehingga tidak menutupi kemungkinan kebakaran merambat ke area lainnya. Jika masyarakat saja yang berusaha memadamkan api itu saja tidak bisa jika terjadi kebakaran yang sangat hebat. Apalagi hanya dengan menggunakan alat yang sesadanya saja ditambah lahan gambut yang bisa memacu api sangat cepat.

a. Waktu pengawasan

Dari wawancara penulis dengan kepala bagian pembinaan dan pengawasan serta masyarakat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan kurang berperan aktif (kurang maksimal) khususnya diareal perkebunan masyarakat sehingga tidak jarang jika terjadi kebakaran masyarakat berusaha untuk memadamkan api itu sendiri dengan peralatan yang seadanya, terjadinya kebakaran di lahan masyarakat setempat sulit untuk mendapatkan bantuan pertolongan kepada tim pemadam kebakaran sedangkan tempatnya cukup jauh dari lahan sehingga tidak menutupi kemungkinan kebakaran merambat ke area lainnya. Jika masyarakat saja yang berusaha memadamkan api itu saja tidak bisa jika terjadi kebakaran yang sangat hebat. Apalagi hanya dengan menggunakan alat yang seadanya saja ditambah lahan gambut yang bisa memacu api sangat cepat.

b. Sosialisasi

Salah satu tindakan penilaian terhadap pengawasan yang dilakukan dapat berupa sosialisasi yaitu berupa pemberitahuan dan pengarahan. Ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan terjadi atau kesalahan yang sama.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota satlakdalkarhutla dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian pada sub indikator sosialisasi belum dikatakan maksimal secara keseluruhan, karena pada

pelaksanaan hukum sangat susah untuk dilaksanakan dan dalam hal pengawasan, dimana sampai saat ini pengawasan yang dilakukan oleh personil regu-regu patroli dari dinas kehutanan dan perkebunan hanya pada saat musim kemarau atau pada saat cuaca ekstrim saja, hal ini tidak akan efisien jika dilakukan pada saat musim kemarau ataupun cuaca ekstrim saja.

c. Pembagian tugas pengawasan

Pembagian tugas adalah merupakan pengkhususan yang dipertimbangkan agar terdapat efisien dan menggunakan tenaga kerja antar instansi yang terkait. Dengan demikian akan diketahui siapa yang melaksanakan dan apa yang dilaksanakan, dengan demikian pembagian tugas setiap instansi terkait mengetahui wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Dari hasil kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa proses pembagian kerja dalam melakukan pengawasan lahan tidak ada masalah yang dapat menghambat pelaksanaan pengawasan atau bisa dikatakan sudah maksimal. Dan dalam hal pembagian tugas pelaksanaan pengawasan lahan ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak saja akan tetapi juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Balai Lingkungan Hidup (BLH) dan Masyarakat. Pembagian tugas sudah efisien dan sudah di susun sedemikian rupa sehingga pada realisasinya tidak terjadinya adanya tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan.

B. Melakukan tindakan penilaian

Penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak. Penilaian pekerjaan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama

a. Laporan rutin

Laporan rutin atau informasi merupakan salah satu tindakan penilaian yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data atau fakta-fakta yang berupa laporan- laporan yang diberikan petugas pemantau kebakaran lahan

Dari kutipan wawancara penulis diatas dapat di simpulkan bahwa laporan rutin yang dilakukan oleh setiap instansi yang terkait sudah berjalan secara maksimal atau sebagaimana mestinya yaitu dengan memberikan informasi mengenai data hotspot adalah balai lingkungan hidup. Balai lingkungan hidup akan memberikan data informasi rutin kepada setiap instansi yang berhak menerima informasi. Balai lingkungan hidup data hotspot dapat diperoleh melalui internet dengan email: poskodal_bapedal@hotmil.com.lewat radio dan televisi. Data hotspot atau titik api panas adalah objek yang terpantau oleh satelit NOAA/ASMC dengan tingkat temperatur yaitu ASMC adalah 48⁰ Celsius, NOAA 38⁰ Celsius, 1 pixel 1,1 x 1,1 km luas objek yang dipantau. Jenis objek yang dapat dipantau oleh satelit dengan suhu tersebut adalah pembakaran tanaman hutan lahan, pembangunan polusi udara oleh industri, pembakaran disawah, ladang setelah panen. Dengan adanya informasi data hotspot yang dapat diperoleh Balai Lingkungan Hidup maka akan memudahkan mengetahui dimana adanya titik api.

b. Laporan lisan

Dalam hal pengukuran kinerja Dinas Kehutan dan Perkebunan itu sendiri dalam hal pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Siak, dilihat dari adanya laporan-laporan dari setiap pihak baik pihak petugas, selain itu juga dilakukan peninjauan langsung kelapangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa instansi yang terkait dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan lisan dari peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan, agar setiap kebakaran yang terjadi dapat segera ditanggulangi. Sebab sebagian masyarakat disini belum memiliki kesadaran penuh tentang arti bahaya yang ditimbulkan dari kebakaran lahan. Selain itu jika terjadi kebakaran lahan, masyarakat adalah orang yang paling dekat dengan lahan dan mereka dapat melakukan pemadaman lebih awal.

2.Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Siak.

A. Sumberdaya manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Siak, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keaslian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, system, proses dan teknis dalam organisasi.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai dinas kehutanan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam segi pendidikan personil hanya tingkat SLTP/SLTA dan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan ataupun pemadaman mereka melakukan pendidikan dan penyuluhan dengan sasaran utama adalah masyarakat. Sebab, masyarakat belum memiliki kesadaran yang penuh tentang arti kelestarian lahan dan bahaya yang ditimbulkan dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga jika terjadi kebakaran lahan, masyarakat orang yang paling dekat dengan lahan dan mereka dapat melakukan pemadaman lebih awal. Dan sebelum mereka jadi regu mereka diajarkan terlebih dahulu bagaimana untuk memadamkan api karena jika tidak biasa-biasa mereka yang terbakar.

B. Sumber daya pendukung

Dalam melakukan Pengawasan serta pemadaman lahan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung merupakan faktor penting. Ketersediaan sumber daya manusia dan pendukung seperti peralatan yang memadai akan mempermudah dan mempercepat proses pemadaman jika terjadi kebakaran lahan setelah peralatan yang cukup maka personil atau tim pemadam kebakaran akan kuwalahan dan kesulitan untuk melaksanakan tugasnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan staf UPTD dishutbun dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satlakdalkarhutla kebakaran lahan masih minim atau bisa dikatakan belum maksimal. Dengan peralatan yang minim maka akan memperlambat proses pengawasan dan pemadaman api pada daerah yang terjadi kebakaran lahan. Peralatan yang dimiliki oleh anggota satlakkarhutla

adalah mobil pemadam, mesin portabel, mesin apung, selang nozle, baju, helm, sarung tangan sepatu boat.

C. Dana/ Biaya

Dalam suatu organisasi baik yang kecil ataupun yang kompleks pasti sangat membutuhkan dana untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh organisasi tersebut. Tanpa adanya dana yang mendukung maka program yang telah direncanakan tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala bagian pembinaan dan pengawasan bahwasannya pengawasan dapat dilakukan secara rutin jika dana yang dialokasikan tercukupi, sebaliknya jika tidak adanya dana maka pengawasan tidak dilakukan secara maksimal sebab kurangnya dana untuk membeli perlengkapan dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu dipandang sangat perlu untuk mengalokasikan dana yang cukup besar untuk kegiatan penanggulangan dan pengawasan kebakaran lahan di Kabupaten Siak.

D. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan lahan ini dapat berupa pengaduan atau melapor adanya pelanggaran yang dilakukan oleh personol dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam hal kebakaran lahan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat diatas dapat digambarkan bahwasannya masih kurangnya partisipasi masyarakat atau belum maksimalnya keikutsertaan masyarakat dalam hal keikutsertaan dalam menjaga atau mencegah kebakaran yang terjadi. Walaupun sudah di himbau dari pihak pemerintah akan tetapi masyarakat juga tidak peduli dengan berbagai alasan yang ada yang menurutnya layak untuknya untuk tetap melakukan pembakaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, mengenai pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Siak maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan sebagai kesimpulan dalam penulisan ini yaitu: bahwa pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Siak dilihat dari semua indikator mulai dari penentuan standar, pemberian penilaian dan juga mengadakan perbaikan dapat dikatakan masih” *belum terlaksana dengan maksimal*” hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya masyarakat yang dengan sengaja melakukan pembakaran ataupun terbakarnya lahan dengan faktor dari alam itu sendiri, pelaksana pengawasan yang dilakukan hanya pada saat cuaca ekstrim atau dimana curah hujan cukup rendah dan pemberian sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku penyebab terjadinya kebakaran karena masih terdapatnya rasa solidaritas

yang tinggi terhadap masyarakat sehingga pelaku tidak takut terhadap sanksi yang diberikan.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan yang dilihat dari semua indikator mulai dari Sumber Daya Manusia, dana/ biaya dan partisipasi masyarakat masih "*belum terlaksana dengan maksimal*" hal ini dikarenakan sumber daya yang kurang memadai, seperti personil pengawasan yang kurang yang tidak sebanding dengan areal yang diawasi atau yang terbakar. kecakapan dan tanggung jawab personil yang lemah, biaya personil yang tidak cukup untuk melakukan pengawasan serta masyarakat yang kurang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melakukan pengawasan. Yang menjadi faktor sangat penting dalam melakukan pengawasan ini adalah faktor sumber daya manusia, karena apabila biaya telah ada dan masyarakat yang mendukung pelaksanaan pengawasan itu sendiri yang tidak memiliki kecakapan atau tanggung jawab dalam bertugas maka tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Siagian, Sondang .P. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Manullang. 1991. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerbit Alumni: Bandung
- Silalahi, Urbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Konsep Teori dan Dimensi*. Bandung :Sinar baru Algesindo
- Hasibuan, H. Melayu. 2005. *Mnajemen*. Jakarta :PT. Bumi Aksara